



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ISNANIYAH
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 479810

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **1.225.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 339 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
2. Tanah Seluas 480 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
3. Tanah Seluas 8.415 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
4. Tanah Seluas 7.672 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
5. Tanah Seluas 9.100 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
6. Tanah Seluas 7.000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **117.628.000**

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA GX ERTIGA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO MATIC 123 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000



4. MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.  
25.878.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 53.853.500

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 26.795.641

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.423.277.141

III. HUTANG Rp. 468.578.800

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 954.698.341

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.